

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM (BSPS) BANTUAN
STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA DI DESA
TANJUNG MEDAN KECAMATAN CERENTI
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

*Disusun Dan Diajukan Untuk Melengkapi Dan Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Program Pendidikan Strada Satu
Program Studi Administrasi Negara*



Oleh :

**MEILIN ALYUDIA
NPM.220411045**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2026**

TANDA PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : MEILIN ALYUDIA
NMP : 220411045
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA
UNIVERSITAS : ISLAM KUANTAN SINGINGI
JUDUL : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM
BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN
SWADAYA DI DESA TANJUNG MEDAN
KECAMATAN CERENTI

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING I



Dr. DESRIADI, S.Sos.,M.Si
NIDN.1022018302

PEMBIMBING II



EMILIA EMHARIS, S.Sos.,M.Si
NIDN.1002059002

Mengetahui

Ketua Program Studi Administrasi Negara

Universitas Islam Kuantan Singingi



ALSAR ANDRI, S.Sos.,M.Si
NIDN. 1005108901

PENGESAHAN SKRIPSI

Diperiksa dan Disahkan oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

Pada :
Hari : Jumat
Tanggal : 10
Bulan : Juli
Tahun : 2026

Tim Penguji

KETUA



SARJAN M, S.Sos., M.Si
NIDN. 1008129002

SEKRETARIS



EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si
NIDN. 1002059002

1. Dr. DESRIADI, S.Sos., M.Si

(Pembimbing I)

2. ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si

(Anggota Penguji I)

3. RISVANDI, S.Pd.I., M.Si

(Anggota Penguji II)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



SARJAN M, S.Sos., M.Si
NIDN. 1008129002

TANDA ORINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Meilin Alyudia
Npm : 220411045
Fakultas : Ilmu Sosial
Program Studi : Administrasi Negara
Universitas : Islam Kuantan Singingi

Dengan ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul : Implementasi Kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Desa Tanjung Medan Kecamatan Cerenti

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata didalam naska skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teluk kuantan, 05 maret 2026

Yang membuat pernyataan

 
MEILIN ALYUDIA
NPM.220411045

MOTTO

*“ALLAH SWT. tidak mengatakan hidup ini mudah . tetapi Allah SWT Berjanji
bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”
(Q.S Al Insyirah : 5-6)*

*“Skripsi ini tidak sempurna, tapi cukup untuk membuat saya wisuda dan
mendapatkan gelar S.sos. Bismillah untuk segala hal-hal baik yang sedang
diperjuangkan”
(Penulis)*

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin, di atas lembar yang menjadi saksi akhir perjalanan ini, penulis mempersembahkan karya sederhana ini untuk Allah SWT, Sang Maha Pemilik arah. Terima kasih telah menjadi satu-satunya rumah tempatku pulang saat dunia terasa begitu kabur dan bising, serta telah menjaga kewarasan dan langkahku bahkan di saat aku hampir lupa alasan untuk tetap hidup. Seperti yang diungkapkan Nadin Amizah, “nyawaku nyala karena dengan-Mu.”

Karya ini juga penulis persembahkan kepada **Bapak tercinta, Yuherman,,** sosok pertama yang menyambut kehadiran penulis ke dunia dengan penuh kebahagiaan. Meskipun beliau tidak sempat merasakan pendidikan formal, beliau mampu mendidik, mendoakan, serta memberikan semangat dan motivasi tiada henti kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan sampai sarjana. Semoga Bapak selalu sehat dan panjang umur. Untuk **Ibu tercinta** dan pintu surga penulis, **Diana Aprianti**, terima kasih atas segala pengorbanan dan kasih sayang tulus yang telah diberikan. Penulis selalu mencintai Ibu. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud bakti dan cinta kasih. Serta ucapan terimakasih kepada saudara kandung, **Marshali ayuna dan Muhazam Adeyudikap**, yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis sampai tahap terselesaikannya skripsi ini.

Penulis

**MEILIN ALYUDIA
NPM. 220411045**

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kami sehingga dapat menyelesaikan Skripsi penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Desa Tanjung Medan Kecamatan Cerenti”

Penulis menyadari bahwa tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ibu **DR. Ikrima Mailani, S.PDi, M.PDi**, selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak **Sarjan.M, S.Sos., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Kuantan Singingi.
3. Bapak **Alsar Andri, S.Sos., M.Si** selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
4. Bapak **Dr. Desriadi, S.Sos., M.Si** selaku dosen pembimbing I yang telah membimbing dan membantu penulis didalam penulisan Skripsi ini serta memberikan arahan yang sangat baik.
5. Bapak **Emilia Emharis, S.Sos., M.Si** pembimbing II yang telah membimbing dan membantu penulis didalam skripsi ini serta memberikan arahan yang sangat baik.
6. Bapak dan ibu dosen serta seluruh staf fakultas ilmu sosial universitas islam kuantan singingi yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu selama penulis menuntut ilmu hingga selesai.
7. Orang Tua penulis yang terkasih dan tersayang terimakasih atas Do’a kasih sayang, dukungan, dan kesabaran terhadap penulis
8. Saudara Kandung Marshali Ayuna dan Muhazam Adeyudilkap, terima kasih telah ikut serta dalam proses penulis menempuh pendidikan dan atas semangat yang diberikan.

9. Sahabat tercinta Putri muharramah, Nizel Aprilia dan Nurnaziha nadiyah yang saling suport dan selalu menyaksikan perjuangan penulis dari awal perkuliahan sampai penyelesaian skripsi ini.
10. Sahabat tersayang Diana Pungki Dan Lismaini yang selalu mendukung dan mendengarkan keluhan dari penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Terakhir, penulis berterima kasih kepada diri sendiri, Meilin Alyudia, atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Terima kasih karena telah berjuang sejauh ini, telah berusaha keras menguatkan diri bahwa mampu menyelesaikan studi sampai selesai, mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan di luar kendali, dan tidak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apa pun prosesnya. Terima kasih sudah berani memilih untuk mencoba, belajar, serta kuat dalam menyelesaikan apa yang telah dimulai. Ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan.

Penulis juga menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan ke depan.

Teluk Kuantan, 26 Maret 2026

Meilin alyudia
Npm. 220411045

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
BAB II LANDASAN TEORI	11
2.1 Tinjauan Pustaka	11
2.1.1 Teori Administrasi Negara.....	11
2.1.2 Teori Organisasi.....	13
2.1.3 Teori Kebijakan Publik	16
2.1.3.1 Formulasi Kebijakan	19

2.1.3.2 Teori Implementasi Kebijakan	23
2.1.3.3 Evaluasi Kebijakan	25
2.1.4 Konsep Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	29
2.1 Kerangka Pemikiran	31
2.2 Hipotesis.....	31
2.3 Definisi Operasional.....	32
2.3.1 Komunikasi	32
2.3.2 Sumber Daya	32
2.3.1 Disposisi	32
2.4 Konsep Variabel	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	35
3.1 Jenis Penelitian.....	35
3.2 Informan Penelitian.....	36
3.3 Sumber Data.....	37
3.3.1 Data Primer	37
3.3.1 Data Sekunder	37
3.4 Fokus Penelitian.....	38
3.5 Lokasi Penelitian.....	38
3.6 Metode Pengumpulan Data	38
3.6.1 Wawancara.....	38
3.6.2 Dokumentasi	39
3.6.3 Observasi.....	39
3.7 Teknik Analisis Data.....	39
3.7.1 Reduksi Data	39
3.7.2 Penyajian Data.....	39

3.7.3 Penarikan Kesimpulan.....	40
3.8 Jadwal Penelitian.....	40
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	41
4.1 Sejarah Kantor Desa Tanjung Medan Kecamatan Cerenti	41
4.2 Letak Geografis Desa Tanjung Medan	42
4.2.1 Keadaan Geografis	42
4.3 Penduduk.....	43
4.4 Pemerintahan Desa.....	43
4.5 Budaya	46
4.6 Kesehatan	47
4.7 Visi Misi.....	48
4.7.1 Visi	48
4.7.2 Misi.....	48
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
5.1 Identitas Responden	49
5.1.1 Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	50
5.1.2 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	50
5.1.3 Identitas Informan Berdasarkan Usia	51
5.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan Tentang Implementasi Kebijakan Program BSPS di Desa Tanjung Medan di Kecamatan Cerenti	52
5.2.1 Indikator Komunikasi.....	52
5.2.1.1 Sosialisasi Program.....	53
5.2.1.2 Kejelasan Informasi Dan Koordinasi Antar Intansi...	64
5.2.1.3 Koordinasi.....	71
5.2.2 Indikator Sumber Daya	76

5.2.2.1 Sumber Daya Manusia.....	76
5.2.2.2 Anggaran	81
5.2.2.3 Sarana dan Prasarana.....	88
5.2.3 Disposisi.....	92
5.2.3.1 Komitmen	93
5.2.3.2 Responsivitas.....	100
5.2.3.3 Tanggung Jawab.....	106
5.2.4 Stuktur Birokrasi.....	113
5.2.4.1 SOP.....	114
5.3 Analisa Hasil Penelitian Tentang Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Tanjung Medan Kecamatan Cerenti	118
BAB VI KESIMPULAN.....	123
6.1 Kesimpulan	123
6.2 Saran.....	123
DAFTAR PUSTAKA.....	125
DOKUMENTASI.....	128

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Data Penerima Bantuan Bedah Rumah Pada Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Semua Desa di Kecamatan Cerenti	7
Tabel 3.1 Informan	38
Tabel 3.8 Jadwal Penelitian.....	41
Tabel 4.2 Aparat Pemerintah Desa	44
Tabel 4.3 Mata Pencarian Penduduk Desa.....	46
Tabel 5.1 Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin	50
Tabel 5.2 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	50
Tabel 5.3 Identitas Informan Berdasarkan Usia.....	51

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	33
Gambar 4.1 Struktur Pemerintahan Desa.....	45



DAFTAR LAMPIRAN

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA DI DESA TANJUNG MEDAN KECAMATAN CERENTI

Oleh:

MEILIN ALYUDIA

NPM : 220411045

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan program pemerintah yang bertujuan membantu masyarakat berpenghasilan rendah dalam meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni melalui bantuan stimulan dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Program BSPS di Desa Tanjung Medan, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis penelitian menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program BSPS di Desa Tanjung Medan telah terlaksana dengan baik. Aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi mendukung pelaksanaan program sehingga bantuan dapat disalurkan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria. Meskipun masih terdapat kendala berupa belum optimalnya sosialisasi dan perlunya peningkatan koordinasi serta pendampingan, secara keseluruhan program ini telah memberikan manfaat dalam meningkatkan kualitas hunian dan kesejahteraan masyarakat penerima bantuan.

Kata Kunci: Implementasi Program BSPS

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF GREEN OPEN SPACE POLICY IN TELUK KUANTAN CITY, RIAU

BY

MEILIN ALYUDIA

NPM : 220411045

The Self-Help Housing Stimulant Assistance Program (BSPS) is a government program aimed at helping low-income communities improve uninhabitable houses into decent housing through stimulant assistance and community empowerment. This study aims to examine the implementation of the BSPS policy in Tanjung Medan Village, Cerenti District, Kuantan Singingi Regency. A qualitative research method was employed, with data collected through interviews, observations, and documentation. The analysis was based on George C. Edward III's policy implementation theory, which includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results indicate that the implementation of the BSPS Program in Tanjung Medan Village has been carried out effectively. The aspects of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure have supported program implementation, enabling assistance to be distributed to eligible beneficiaries. Although some obstacles remain, such as limited socialization and the need for improved coordination and assistance, the program has generally contributed to improving housing quality and community welfare.

Keywords: *Implementation BSPS Program.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang menjadi jantung dari pembentukan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat. Sebuah rumah yang layak huni tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlindung dari cuaca dan bahaya, tetapi juga merupakan fondasi utama untuk kesehatan, kenyamanan, produktivitas, dan stabilitas sosial keluarga. Di Indonesia, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pemenuhan kebutuhan perumahan masih menjadi tantangan besar hingga saat ini. Masih banyak keluarga yang terpaksa tinggal di rumah tidak layak huni (RTLH) yang condition fisiknya sangat memprihatinkan serta jauh dari standar minimum kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan.

Data dari Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR menunjukkan backlog atau kekurangan rumah layak huni di Indonesia mencapai jutaan unit, dan ini berkontribusi besar pada kondisi kemiskinan struktural dan ketidakmerataan akses terhadap layanan dasar. Kondisi RTLH seringkali menimbulkan berbagai masalah sosial dan kesehatan, termasuk penyebaran penyakit, risiko kecelakaan rumah tangga, dan menurunnya produktivitas penduduk. Selain itu, permukiman kumuh yang menyebar di berbagai daerah memperlihatkan kurangnya pengelolaan dan perencanaan yang matang mengenai pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang layak dan sehat.

Menjawab tantangan tersebut, pemerintah Indonesia memberikan perhatian serius dan memperlihatkan komitmen nyata melalui pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang telah dimulai sejak tahun 2015. Program BSPS merupakan salah satu upaya strategis pemerintah untuk mempercepat pengurangan backlog rumah dengan memberikan stimulan berupa bantuan bahan bangunan kepada masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat membangun atau memperbaiki rumahnya dengan swadaya mereka sendiri. Melalui pendekatan partisipatif tersebut, pemerintah tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik akan rumah, tapi juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat sebagai pelaku utama dalam pembangunan perumahan, memperkuat nilai gotong-royong, solidaritas, dan kemandirian masyarakat. Ini menjadi aspek penting dalam pembangunan berkelanjutan di sektor perumahan.

Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dimulai dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum yang menetapkan kebijakan, anggaran, dan lokasi penerima bantuan. Selanjutnya, pemerintah daerah mengusulkan dan memverifikasi calon penerima sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Setelah dilakukan verifikasi oleh fasilitator, penerima bantuan ditetapkan dan dana disalurkan untuk pembangunan atau perbaikan rumah secara swadaya. Selama proses pelaksanaan, pemerintah dan fasilitator melakukan pendampingan, pengawasan, serta evaluasi agar bantuan tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Syarat kriteria rumah tidak layak huni yang boleh menerima program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) peraturan menteri pekerjaan umum

dan perumahan rakyat (pupr) nomor 07 tahun 2018 tentang program bantuan stimulan perumahan swadaya yaitu:

1. Memiliki rumah sendiri atas nama pemilik nya
2. Kerusakan komponen utama bangunan rumah seperti atap, lantai, dan dinding.
3. Luas rumah tidak sesuai standar perorang
4. Tidak menyehatkan bagi pemilik/penghuni rumah

Memiliki rumah atas nama sendiri merupakan salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga memiliki makna sosial, ekonomi, dan hukum yang sangat penting. Kepemilikan rumah yang sah atas nama pemiliknya mencerminkan tingkat kesejahteraan, stabilitas, serta kemandirian individu maupun keluarga dalam menjalani kehidupan. Selain itu, rumah yang terdaftar secara resmi atas nama pemilik memberikan kepastian hukum, melindungi hak atas kepemilikan tanah dan bangunan, serta mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari. Dalam konteks kebijakan pemerintah, upaya untuk mendorong masyarakat agar memiliki rumah layak huni dan terdaftar atas nama pemiliknya sejalan dengan tujuan program perumahan nasional, seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), yang berorientasi pada peningkatan kualitas tempat tinggal sekaligus penataan administrasi pertanahan yang lebih tertib. Dengan demikian, kepemilikan rumah atas nama sendiri tidak hanya menjadi kebutuhan individu, tetapi juga bagian dari pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan di tingkat daerah maupun nasional.

Kerusakan pada komponen utama bangunan rumah seperti atap, lantai, dan dinding dapat menyebabkan kondisi hunian menjadi tidak layak dan tidak menyehatkan bagi pemilik rumah. Kerusakan tersebut sering kali menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kebocoran saat hujan, dinding lembap dan berjamur, serta lantai yang retak atau rusak, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kesehatan fisik maupun kenyamanan penghuni. Rumah dengan kondisi demikian tidak hanya mengurangi kualitas hidup, tetapi juga berpotensi menimbulkan penyakit akibat lingkungan yang tidak bersih dan tidak memenuhi standar rumah sehat. Faktor penyebab utama kerusakan tersebut umumnya berkaitan dengan usia bangunan yang sudah tua, kurangnya perawatan, serta keterbatasan ekonomi masyarakat dalam melakukan perbaikan secara berkala. Oleh karena itu, perbaikan dan peningkatan kualitas komponen utama rumah menjadi sangat penting agar tercipta hunian yang layak, aman, dan menyehatkan bagi penghuninya.

Rumah perorangan yang layak huni yaitu bangunan tempat tinggal yang mampu memenuhi kebutuhan dasar penghuninya dalam hal keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan kelayakan ruang hidup. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), rumah layak huni harus memiliki komponen utama bangunan yang memenuhi standar, yaitu atap yang tidak bocor, dinding yang kuat dan tidak lapuk, serta lantai yang bersih dan tidak berlubang. Selain itu, rumah juga wajib dilengkapi dengan sarana sanitasi yang memadai, akses air bersih, pencahayaan dan ventilasi yang cukup, serta memiliki luas ruang yang proporsional dengan jumlah anggota keluarga yang menempati.

Kerusakan pada komponen utama bangunan rumah seperti atap, lantai, dan dinding dapat menyebabkan kondisi hunian menjadi tidak layak dan tidak menyehatkan bagi pemilik rumah. Kerusakan tersebut sering kali menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kebocoran saat hujan, dinding lembap dan berjamur, serta lantai yang retak atau rusak, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kesehatan fisik maupun kenyamanan penghuni. Rumah dengan kondisi demikian tidak hanya mengurangi kualitas hidup, tetapi juga berpotensi menimbulkan penyakit akibat lingkungan yang tidak bersih dan tidak memenuhi standar rumah sehat. Faktor penyebab utama kerusakan tersebut umumnya berkaitan dengan usia bangunan yang sudah tua, kurangnya perawatan, serta keterbatasan ekonomi masyarakat dalam melakukan perbaikan secara berkala. Oleh karena itu, perbaikan dan peningkatan kualitas komponen utama rumah menjadi sangat penting agar tercipta hunian yang layak, aman, dan menyehatkan bagi penghuninya.

Dinas perumahan kawasan permukiman dan pertahan kabupaten kuantan singingi ditunjuk sebagai pelaksana dan penanggung jawab dari program bantuan stimulan perumahan swadaya untuk kelompok kerja (pokja) kabupaten/kota tentunya dalam melaksanakan tugas nya , dinas perumahan kawasan pemukiman dan pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi harus mengacu kepada petunjuk teknis yang telah diserahkan oleh kementrian PUPR kepada daerah dengan adanya petunjuk teknis tersebut, hal ini akan memudahkan pihak dinas dalam membuat rencana kerja tentang program BSPS khususnya di Kabupaten Kuantan singingi.

Meskipun Desa Tanjung Medan telah menjadi salah satu penerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan total tujuh unit rumah yang

dibangun, pelaksanaan program tersebut di lapangan masih menghadapi beberapa kendala. Berdasarkan hasil pengamatan, dari tujuh rumah penerima bantuan tersebut terdapat dua unit rumah yang belum sepenuhnya sesuai dengan kriteria penerima maupun standar kelayakan rumah yang telah ditetapkan dalam pedoman pelaksanaan BSPS. Kondisi ini mengindikasikan bahwa proses seleksi dan verifikasi data calon penerima bantuan di tingkat desa masih memerlukan perhatian dan evaluasi lebih lanjut agar tidak terjadi ketidaktepatan sasaran. Oleh karena itu, diperlukan adanya kajian yang lebih mendalam untuk menilai sejauh mana implementasi kebijakan BSPS di Desa Tanjung Medan telah berjalan sesuai dengan ketentuan serta bagaimana upaya perbaikan yang dapat dilakukan agar program ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan hunian layak dan sehat.

Berdasarkan data kependudukan, Desa Tanjung Medan memiliki sebanyak 364 Kepala Keluarga (KK) dengan kondisi sosial ekonomi yang beragam. Dari jumlah tersebut, masih terdapat dua rumah yang seharusnya layak mendapatkan bantuan program BSPS karena kondisi bangunannya tergolong tidak layak huni serta tidak memenuhi standar rumah sehat dan aman. Namun, rumah-rumah tersebut belum terakomodasi dalam daftar penerima bantuan. Situasi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program di tingkat desa masih menghadapi tantangan dalam hal pendataan, verifikasi, dan ketepatan sasaran penerima bantuan, sehingga diperlukan evaluasi mendalam agar program BSPS benar-benar menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.

Tabel 1.1 Data Penerima Bantuan Bedah Rumah Pada Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Tanjung Medan.

No.	Nama Penerima	Usia
1.	Masdarmi	72 tahun
2.	Subaidah	35 tahun
3.	Masria	70 tahun
4.	Sumiati	37 tahun
5.	marni	36 tahun
6.	Yulianis	66 tahun
7	suraida	44 tahun

Sumber : Kantor Kepala Desa Tanjung Medan Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi 2026.

Desa Tanjung medan mendapatkan bantuan program stimulan perumahan swadaya (BSPS) sebanyak 7 unit rumah, hal ini dikarenakan dilatarbelakangi terkait adanya 7 rumah warga tidak layak huni dan yang tidak menyehatkan bagi penghuni rumah.

Secara khusus, kondisi desa Tanjung Medan yang berada di Kecamatan Cerenti termasuk dalam wilayah yang memiliki sejumlah keluarga yang masih tinggal di rumah-rumah dengan kondisi sangat terbatas dan jauh dari layak huni. Beberapa rumah mengalami kerusakan, atap bocor, dinding rapuh, sanitasi yang buruk, serta kurangnya akses air bersih dan fasilitas mendasar lainnya. Kondisi ini berdampak langsung pada kualitas hidup warga. Lebih lanjut, keberadaan permukiman yang kurang terorganisasi dengan baik membuat perbaikan lingkungan secara umum menjadi sulit dilakukan, sehingga memperkuat siklus kemiskinan dan ketertinggalan sosial ekonomi masyarakat setempat. Hambatan pendanaan, kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pembangunan rumah layak, serta keterbatasan akses informasi dan teknologi memperparah masalah ini.

Program BSPS hadir sebagai solusi yang tepat di tengah dinamika tersebut, dengan menyediakan bantuan bahan bangunan yang menjadi stimulan bagi masyarakat untuk memulai atau memperbaiki hunian mereka secara mandiri. Nilai bantuan yang disalurkan pun terus mengalami peningkatan, menyesuaikan perubahan harga dan kebutuhan di lapangan. Sebagai contoh, berdasarkan keputusan menteri pupr nomor 158 tahun 2019, nilai bantuan stimulus bps dinaikkan hingga rp 17,5 juta per unit untuk daerah umum, dan mencapai rp 35 juta untuk daerah-daerah khusus seperti Pulau Kecil Dan Wilayah Pegunungan. Kebijakan Ini Diharapkan Dapat Meningkatkan Daya Jangkau Dan Kualitas Hasil Pembangunan Rumah Swadaya.

Meskipun capaian program bps telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas fisik rumah, masih terdapat sejumlah kendala yang menghalangi efektivitas program ini berjalan optimal di tingkat desa dan kecamatan, termasuk di desa tanjung medan. Pertama, kualitas sosialisasi program masih kurang merata dan belum sampai ke semua lapisan masyarakat, sehingga banyak warga yang kurang memahami mekanisme, kriteria penerima bantuan, dan manfaat yang dapat diperoleh dari program ini. Kedua, keterbatasan sumber daya pendamping yang mampu mendampingi masyarakat selama proses pembangunan rumah menimbulkan keterlambatan dan kurangnya bimbingan teknis. Ketiga, koordinasi antar lembaga pemerintah terkait seperti kecamatan, desa, serta dinas teknis sering tidak maksimal sehingga proses verifikasi maupun pengawasan pelaksanaan bantuan menjadi kurang efektif. Keempat, terdapat potensi

ketidaktepatan sasaran yang menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat dan berkurangnya kepercayaan terhadap program.

Melihat berbagai faktor tersebut, upaya evaluasi dan perbaikan pelaksanaan program bps di wilayah desa tanjung medan sangat perlu dilakukan. Pelaksanaan program yang lebih terstruktur, transparan, serta memberdayakan masyarakat secara penuh dapat memaksimalkan manfaat program ini dalam memperbaiki kualitas hunian dan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Implementasi yang baik diharapkan tidak hanya menghasilkan rumah yang layak, tetapi juga memberikan dampak sosial-ekonomi positif berupa peningkatan kesehatan, produktivitas, rasa aman, dan solidaritas sosial yang lebih kuat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : “Bagaimana Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Tanjung Medan Kecamatan Cerenti?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Tanjung Medan Kecamatan Cerenti, Mulai Dari Tahap Sosialisasi, Seleksi Penerima Bantuan, Hingga Pelaksanaan Pembangunan Rumah.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya kajian akademis tentang pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam konteks pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan berbasis perumahan. Hasil penelitian akan memberikan kontribusi pada pengembangan teori implementasi kebijakan publik khususnya dalam sektor perumahan, serta memperkuat konsep pemberdayaan masyarakat dalam membangun hunian yang layak secara swadaya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis berupa peningkatan efektivitas pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Tanjung Medan Kecamatan Cerenti. Secara langsung, hasil penelitian dapat membantu pemerintah daerah dan pihak terkait dalam mengoptimalkan proses distribusi bantuan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan rumah layak huni. permukiman yang sehat, aman, dan nyaman bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Teori Administrasi Negara

Administrasi negara adalah seluruh proses kegiatan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah dalam mengelola urusan pemerintahan untuk mencapai tujuan negara dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Administrasi negara mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan terhadap kebijakan publik yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam program bantuan perumahan swadaya, administrasi negara berperan penting sebagai mekanisme pengelolaan kebijakan publik di bidang perumahan dan permukiman rakyat. Program ini merupakan wujud nyata pelaksanaan fungsi administrasi negara dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan tempat tinggal yang layak.

Menurut Stillman dalam Wawan Mulyawan, dkk (2024:7) administrasi negara adalah “proses merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan pemerintahan” Definisi ini menyoroti bahwa administrasi negara tidak hanya terbatas pada perumusan kebijakan, tetapi juga melibatkan pelaksanaan serta evaluasi terhadap keberhasilan kebijakan tersebut.

D. Waldo mengenai administrasi negara yaitu: 1. Administrasi negara adalah organisasi dan manajemen dari manusia dan benda guna mencapai tujuan

pemerintah. 2. Administrasi negara adalah suatu seni dan ilmu tentang manajemen yang dipergunakan untuk mengatur urusan-urusan negara.

Sondang P. Siagian Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Aneta, 2012).

Luther Gulick, dalam bukunya “Peper on the science of administration” mengemukakan bahwa administrasi bertalian dengan pelaksanaan kerja, dengan pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan.

William H. Newman dalam bukunya “Administrative Action The techniques of Organization and management” menyebutkan bahwa administrasi adalah pembimbingan, kepemimpinan dan pengawasan usaha-usaha suatu kelompok orang-orang kearah pencapaian tujuan bersama.

Menurut The Liang Gie Administrasi adalah segenap rangkaian perbuatan penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Dari pengertian tersebut diatas dapat diperoleh tiga hal penting yaitu : Pertama: bahwa kegiatan itu melibatkan dua orang atau lebih. Kedua: adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Ketiga: ada tujuan tertentu yang hendak dicapai. Dari ketiga ciri tersebut merupakan rangkaian yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Ditengah masyarakat kegiatan tersebut merupakan satu rangkaian kegiatan yang terus menerus dan teratur yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang dalam kerangka kerjasama untuk

mencapai tujuan yang telah ditentukan, oleh The Liang Gie dirangkum dalam satu istilah yaitu “administrasi”.

Munawardi Reksohadiprawiro, administrasi adalah ‘Setiap pengaturan yang rapi dan sistematis serta penentuan fakta-fakta secara tertulis, dengan tujuan memperoleh pandangan yang menyeluruh serta hubungan timbal balik antara satu fakta dengan fakta yang lain.

G. Kartasapoetra, administrasi adalah ‘suatu alat yang dapat dipakai menjamin kelancaran dan keberesan bagi setiap manusia untuk melakukan perhubungan, persetujuan dan perjanjian atau lain sebagainya antara sesama manusia/atau badan hukum yang dilakukan secara tertulis.

Wijana administrasi negara adalah ‘Rangkaian semua organ Negara dari yang rendah sampai yang tinggi, yang bertugas menjalankan pemerintahan, pelaksanaan dan kepolisian.

T Y. Wayong administrasi negara juga merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengendalikan usaha-usaha instansi pemerintah agar tujuannya tercapai (NEGARA, 2012).

2.1.2 Teori Organisasi

Organisasi menurut para ahli (dalam Werdiningsih et al., 2023:2-4)

1. Prof. Dr. Mr Pradjudi Armosudiro, Organisasi merupakan kerangka pembagian kerja dan kerangka tata komunikasi kerja antara sekumpulan

orang yang memegang posisi dan bekerjasama secara tertentu dan bersama sama guna tercapainya tujuan tertentu.

2. C. Argyris Organisasi, adalah suatu strategi besar yang diciptakan individu-individu dalam rangka mencapai berbagai tujuan yang membutuhkan usaha dari banyak orang.
3. Prof Dr. Sondang P. Siagian, Organisasi merupakan setiap wujud persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terkait dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang mana terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut dengan bawahan.
4. E. Wight Bakke, Organisasi adalah suatu sistem berkelanjutan dari aktifitas-aktifitas manusia yang terdiferensiasi dan terkoordinasi, yang mempergunakan, mentransformasi, dan menyatupadukan seperangkat khusus manusia, material, modal, gagasan, dan sumber daya alam menjadi suatu kesatuan pemecahan masalah yang unik dalam rangka memuaskan kebutuhan-kebutuhan tertentu manusia dalam interaksinya dengan sistem-sistem lain dari aktifitas manusia dan sumber daya dalam lingkungannya.
5. Victor A. Thompson Organisasi merupakan suatu integrasi dari sejumlah orang yang ahli yang bekerja sama dengan sangat rasional dan impersonal untuk mencapai tujuan-tujuan yang spesifik dan telah disepakati sebelumnya.

6. Stephen P. Robbins Organisasi adalah suatu entitas sosial yang secara sadar terkoordinasi, memiliki suatu batas yang relatif dapat diidentifikasi, dan berfungsi secara relatif kontinu (berkesinambungan) untuk mencapai suatu tujuan atau seperangkat tujuan bersama.
7. Mills dan Mills, Organisasi adalah Kolektivitas khusus manusia yang aktivitas-aktivitasnya terkoordinasi dan terkontrol dalam dan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

(Robbis, 1990) organisasi dapat didefinisikan sebagai satu kesatuan entitas sosial yang dikoodinasikan secara sadar, diikuti pembatasanpembatasan yang secara relatif berkesinabungan dengan pengidentifikasian rambu-rambunya secara jelas serta senantiasa berupaya meraih pencapain tujuan atau sekumpulan tujuannya secara bersama-sama,

Daft (2020) (dalam Rivai et al., 2024:2) mendefinisikan teori organisasi sebagai kerangka kerja yang mencakup berbagai perspektif untuk memahami dan mengelola organisasi dalam konteks yang kompleks dan dinamis.

Henri Fayol (dalam Rivai et al., 2024:3) mengembangkan teori administrasi yang menekankan pada fungsi-fungsi manajerial seperti perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengarahan. Fayol mengidentifikasi 14 prinsip manajemen, termasuk pembagian kerja, otoritas dan tanggung jawab, dan kesatuan komando, yang masih relevan hingga saat ini .

Organisasi didefinisikan sebagai perkumpulan atau wadah bagi sekelompok orang yang berkolaborasi secara terorganisir untuk mencapai tujuan

tertentu. Selain itu, organisasi juga dapat dipahami sebagai kelompok atau entitas yang terdiri dari banyak individu. Ini bisa berupa asosiasi, institusi, atau jenis pendirian lain dengan tujuan bersama dan ikatan dengan dunia luar.(Septiani et al., 2024:30).

J. William Schulze (dalam Septiani et al., 2024:30) mendefinisikan organisasi sebagai kumpulan individu, benda, alat, ruang kerja, dan semua elemen terkait yang diatur dengan cara yang produktif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu (Claudya Nurcahya et al., 2023). Max Weber, di sisi lain, mendefinisikan organisasi sebagai kerangka kerja yang terstruktur dengan otoritas, tanggung jawab, dan pembagian kerja untuk setiap tugas tertentu.

2.1.3 Teori Kebijakan Publik

Menurut Dye (dalam Dwiyanto Indiahono : 2009 : 17) kebijakan publik adalah Whatever government choose to do or not to do. Maksudnya bahwa apapun kegiatan pemerintah baik yang eksplisit maupun implisit merupakan kebijakan. Interpretasi dari kebijakan tersebut mempunyai makna dua hal penting yaitu: pertama, bahwa kebijakan haruslah dilakukan oleh badan pemerintah, kedua, kebijakan tersebut mengandung pilihan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah

a James E. Anderson mendefinisikan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam bidang kegiatan tertentu. Pembicaraan tentang kebijakan tidak terlepas dari kaitan kepentingan antar kelompok, baik ditingkat pemerintahan maupun masyarakat secara umum.

Young dan Quinn, 2002, (sebagaimana dikutip Edi Suharto : 2010), yaitu sebagai berikut :

1. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politisi dan finansial untuk melakukannya.
2. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan kongkrit yang berkembang di masyarakat.
3. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukan merupakan sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.
4. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Namun kebijakan publik bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu.

Istilah kebijakan seringkali penggunaannya saling dipertukarkan dengan istilah tujuan (goals), program, keputusan, Undang-Undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan-rancangan besar (Abdul Wahab, 1997: 2). Kebijakan pada intinya adalah sebagai pedoman untuk bertindak. Pedoman ini boleh jadi

amat sederhana atau kompleks, bersifat umum maupun khusus. Sejalan dengan makna kebijakan yang dikemukakan oleh United Nation tersebut di atas.

Fredrick (dalam Islamy, 1998) memberikan pengertian kebijakan, yaitu serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam satu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Anderson (dalam Islamy, 1998) mengatakan bahwa kebijakan itu adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu. Berdasarkan pengertian tentang kebijakan yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwasanya kebijakan dapat dilakukan secara umum, namun pada kenyataannya lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam tindakan-tindakan atau perilaku pemerintah serta perilaku Negara pada umumnya yang lebih dikenal dengan sebutan kebijakan Negara atau kebijakan publik (publik policy)

Menurut Easton (1965) kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara sah kepada seluruh anggota masyarakat. Sedangkan Anderson (1970) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah.

2.1.3.1 Formulasi Kebijakan

Model Formulasi Kebijakan Menurut David Easton David Easton mengembangkan kerja sistem dalam hal formulasi kebijakan. Dalam model sistem ini, kebijakan publik dipandang sebagai tanggapan dari suatu sistem politik terhadap ekspektasi dan tuntutan yang muncul dari lingkungan yang merupakan kondisi atau keadaan yang berada diluar batas-batas politik. Kekuatan politik yang muncul dari dalam lingkungan dan mempengaruhi sistem kebijakan dan politik dipandang sebagai masukan-masukan (inputs) dalam sistem kebijakan dan politik, sementara hasil- hasil yang dikeluarkan oleh sistem kebijakan dan politik sebagai keluaran (outputs) dari sebuah sistem kebijakan dan politik itu sendiri. Dalam sirkulasi formulasi kebijakan maka sistem dan subsistem kebijakan tidak akan pernah berhenti (Kadji, 2016).

Model Formulasi Kebijakan Menurut Pained dan Naumes Paine dan Naumes menawarkan suatu model formulasi kebijakan publik yang dikembangkan dari model sistem David Easton. Model ini disebut Model Deskriptif yang berusaha mendeskripsikan secara faktual dan nyata yang terjadi dalam proses formulasi kebijakan publik (Kadji, 2016).

Paine dan Naumes menggambarkan model formulasi kebijakan sebagai interaksi yang terjadi antara lingkungan dengan para aktor kebijakan dalam suatu proses yang dinamis. Dengan asumsi bahwa dalam hal formulasi kebijakan terdiri dari interaksi nyata yang terbuka dan

dinamis antar aktor formulator kebijakan dengan lingkungannya. Interaksi yang terjadi dalam bentuk keluaran dan masukan (inputs dan outputs). Output yang dihasilkan oleh organisasi pada akhirnya akan menjadi bagian integral dengan lingkungan dan seterusnya akan berinteraksi dengan organisasi (Kadji, 2016).

Model Formulasi Kebijakan Menurut John D. Bryson John D. Bryson (dalam Kadji, 2016:43-44) menawarkan model formulasi kebijakan yang disebutnya Model Strategis, yang menekankan bahwa

1. Keputusan Pokok (Principal)
2. Keputusan Tambahan (Incremental)
3. Produk Kebijakan sebagai Keputusan Terlegitimasi

Pendekatan teori ini menggunakan rumusan runtutan atau tahapan permusan strategi sebagai basis formulasi kebijakan publik. Menurut Bryson, Perencanaan strategis merupakan upaya yang didisiplinkan untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan memandu bagaimana menjadi organisasi (atau etnis lainnya), apa yang dikerjakan organisasi (atau etnis lainnya), dan mengapa organisasi (atau etnis lainnya) mengerjakan hal seperti ini. Perencanaan strategis mensyaratkan pengumpulan informasi secara luas, eksploratif alternative dan menekankan pada implikasi masa depan dengan keputusan sekarang (Kadji, 2016).

Lebih lanjut Bryson menegaskan, bahwa perencanaan strategis dapat membantu organisasi untuk berpikir secara strategis dan mengembangkan strategi-strategi yang efektif, memperjelas arah masa depan, menciptakan prioritas, membuat keputusan sekarang dengan memperhatikan konsekuensi masa depan, control organisasi, memecahkan masalah utama organisasi, menangani keadaan yang berubah dengan cepat secara efektif.

Model Strategis Bryson ini menekankan proses perumusan formulasi kebijakan sebagai berikut: (1) mengusulkan dan menyepakati perencanaan strategi (memahami manfaat perencanaan strategi dan mengembangkannya), (2) merumuskan panduan proses, (3) memperjelas wewenang dan misi organisasi, (4) melakukan analisis SWOT, (5) mengidentifikasi isu strategi yang dihadapi, dan (6) merumuskan strategi untuk mengelola isu. Model strategis ini memfokuskan diri kepada langkah- langkah yang berkenaan dengan Manajemen Strategis.

Formulasi kebijakan merupakan pengembangan alternatif-alternatif kebijakan dalam menghadapi masalah-masalah yang telah masuk dalam agenda publik Untuk bisa memahami proses formulasi kebijakan, langkahpertama yang harus dilakukan adalah perlunya memahami aktor-aktor yang terlibat atau pemeran dalam proses perumusan kebijakan, baik aktor-aktor yang resmi maupun yang tidak resmi, seperti diungkapkan Charles Lindblom (1984:3), bahwa untuk memahami siapa sebenarnya yang merumuskan kebijakan, lebih dahulu harus dipahami sifat-sifat

semua pemeran serta partisipan, bagian atau peran apa yang mereka lakukan, wewenang atau bentuk kekuasaan yang mereka miliki, dan bagaimana mereka saling berhubungan serta saling mengawasi.

Selanjutnya menurut Mark Rushefky (1990:4), perlu dipertajam dengan melihat cara apa yang mereka gunakan untuk mempengaruhi proses formulasi sebuah kebijakan sehingga menjadi sebuah kebijakan yang ditetapkan. Pembahasan menyangkut aktor-aktor yang terlibat perlu dilakukan untuk mengetahui siapa yang berperan utama mendefinisikan masalah dan bagaimana masalah itu didefinisikan adalah merupakan hal yang penting. Definisi masalah yang berbeda akan mempunyai implikasi yang berbeda terhadap kebijakan. Formulasi kebijakan terjadi di dalam birokrasi pemerintah, kantor-kantor swasta, kelompok-kelompok kepentingan, ruang komite legislatif, pertemuan komisi khusus, dan organisasi perencana kebijakan atau dikenal juga sebagai thinktanks. Kelompok kepentingan tertentu dapat memformulasikan proposal kebijakan mereka sendiri melalui asosiasi dengan para anggota legislatif atau stafnya yang menunjukkan kesamaan kepentingan. Staf kelompok kepentingan seringkali menyumbang pengetahuan teknis yang berharga bagi suatu informasi kebijakan, juga informasi politik tentang posisi mereka dalam melihat suatu isu. (Mustari, 2015)

2.1.3.2 Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara bagaimana suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya. Menurut Anderson (1979) dalam Eny Haryati (2006:5), (Dalam Skripsi Mualimin : 2010) kebijakan publik bersifat non-self executing, yaitu kebijakan publik baru akan menimbulkan efek tertentu, setelah diimplementasikan.

Implementasi kebijakan merupakan bagian dari proses pembuatan kebijakan (policy making process). Seperti dinyatakan Hasbullah (2015), bahwa proses pembuatan kebijakan merupakan proses politik yang berlangsung dalam tahap-tahap pembuatan kebijakan politik, dimana aktivitas politis ini dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan, dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung satu sama lainnya, diatur menurut urutan waktu, seperti penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan.

Grindle (1980) menyatakan bahwa implementasi kebijakan bukan hanya sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan juga menyangkut masalah konflik kepentingan, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari kebijakan tersebut.

Implementasi kebijakan merupakan suatu studi kebijakan publik yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Pada tataran

praktik, implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu rumit bahkan tidak jarang bermuatan kepentingan politik dengan adanya intervensi aktor-aktor politik. Implementasi sebagai ‘to provide the means for carrying out (menyediakan sarana melaksanakan sesuatu); to give practical effects to (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu)’ (Wahab, 1997).

Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu tertentu (Hasman, 2015).

Van Meter dan Van Horn, sebagaimana dikutip Agustino (2008:39) merumuskan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Edwards III sebagaimana dipaparkan oleh Faturrahman (2016: 18) mengatakan bahwa implementasi kebijakan publik dalam studi kebijakan publik merupakan studi yang sangat “crucial” pada proses kebijakan publik.

Beberapa model pendekatan dalam implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh para ahli memetakan pula faktor-faktor yang

memengaruhi implementasi kebijakan publik, sebagaimana bisa disarikan dari Agustino (2008: 140-161), sebagai berikut:

1. Model Donald Van Metter dan Carl Va Pada model Metter dan Horn yang merupakan pendekatan top-down, implementasi merupakan sebuah abstraksi atau performansi yang sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi.
2. Model Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier Pada model Mazmanian dan Sabatier, peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang memengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi.
3. Model George C. Edward III Perspektif model pendekatan implementasi Edward III adalah top-down, mendalilkan adanya 4 (empat) variabel sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.
4. Model Merilee S. Grindle Pendekatan model Grindle memahami implementasi kebijakan sebagai suatu proses politik dan administratif. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (outcomes), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih.

2.1.3.3. Evaluasi Kebijakan

Menurut Lester dan Stewart (Winarno, 2008) evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda, tugas pertama adalah

untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi yang Analisis Kebijakan Publik ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi kebijakan merupakan persoalan fakta yang berupa pengukuran serta penilaian baik terhadap tahap implementasi kebijakannya maupun terhadap hasil (outcome) atau dampak (impact) dari bekerjanya suatu kebijakan atau program tertentu, sehingga menentukan langkah yang dapat diambil dimasa yang akan datang.

Kegiatan evaluasi merupakan tahap penting bagi keseluruhan proses analisis kebijakan publik. Kegiatan ini, selain dapat memberikan satuan-satuan nilai tertentu terhadap kebijakan yang sudah diimplementasikan, juga dapat menjadi “pintu” baru untuk memasuki kegiatan pembuatan dan analisis kebijakan berikutnya. Evaluasi meliputi beberapa aspek yang sama penting dengan aspek-aspek yang mencakup dalam kegiatan-kegiatan analisis kebijakan tahap sebelumnya (Meutia, 2017).

Secara umum, istilah evaluasi dipadankan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian (assesment). Dalam arti spesifik, evaluasi berkaitan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan (Dunn 2003). Ketika hasil kebijakan memiliki nilai, hal ini karena hasil tersebut memberi sumbangan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan. Hal ini

mengandung arti pula, bahwa suatu kebijakan atau program telah mencapai kinerja yang bermakna, yang berarti masalah-masalah kebijakan yang dibuat telah jelas dan dapat diatasi.

Aktivitas evaluasi seringkali disamaartikan dengan kegiatan pemantauan. Kegiatan pemantauan berbeda dengan aktivitas evaluasi kebijakan. Pemantauan utamanya menekankan pada pembentukan premis-premis faktual mengenai kebijakan publik, sedangkan evaluasi memfokuskan diri pada penciptaan premis- premis nilai yang diperlukan untuk menghasilkan informasi mengenai kinerja kebijakan (Dunn 2003). Pendek kata, pemantauan hendak menjawab pertanyaan “apa yang terjadi, bagaimana, dan mengapa?”, sedangkan evaluasi menjawab pertanyaan “apa perbedaan yang telah dibuat?”

Setiap evaluasi kebijakan memiliki ciri-ciri tertentu yang dapat dijadikan sebagai patokan bagi seorang analis untuk melakukan evaluasi terhadap suatu kebijakan. Ciri-ciri evaluasi kebijakan dimaksud di antaranya (1) tujuannya menemukan hal-hal strategis, untuk meningkatkan kinerja kebijakan, (2) evaluator mampu mengambil jarak dari pembuat kebijakan, pelaksana, dan target kebijakan, (3) prosedur dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis, (4) dilaksanakan tidak dalam suasana permusuhan dan kebencian, (5) mencakupi rumusan, implementasi, lingkungan, dan kinerja kebijakan (Nugroho 2009).

Dunn (2003) mencatat bahwa evaluasi kebijakan memiliki sejumlah karakteristik yang membedakannya dari metode analisis

kebijakan lainnya. Pertama, fokus nilai. Evaluasi merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial dari suatu kebijakan atau program. Oleh karena ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan dapat selalu dipertanyakan, maka evaluasi juga berkenaan dengan prosedur untuk mengevaluasi tujuan dan sasaran kebijakan. Kedua, interdependensi fakta-nilai. Tuntutan evaluasi tergantung pada fakta dan nilai. Untuk memastikan bahwa kebijakan atau program telah mencapai kinerja yang tertinggi, diperlukan tidak hanya hasil-hasil kebijakan berharga bagi sejumlah individu, kelompok, atau masyarakat; tetapi juga harus didukung oleh sejumlah bukti bahwa kebijakan secara aktual merupakan konsekuensi dari aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Ketiga, orientasi masa kini dan masa lalu. Tuntutan evaluatif berbeda dengan tuntutan advokatif. Evaluasi lebih diarahkan pada hasil sekarang dan pada masa lalu daripada hasil di masa mendatang. Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi-aksi dilakukan. Keempat, dualitas nilai. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi memiliki kualitas ganda. Nilai dipandang memiliki tujuan sekaligus cara. Dalam hal ini, evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkaitan dengan nilai yang ada dapat dianggap sebagai sesuatu yang intrinsik maupun ekstrinsik. Nilai-nilai ditata dalam suatu hierarki yang merefleksikan kepentingan relatif dan saling tergantung antara tujuan dan sasaran (Handoyo, 2012).

2.1.4 Konsep Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Bantuan Stimulan Swadaya (BSPS) dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 07 Tahun 2018 tentang Stimulan Bantuan Swadaya Perumahan (BSPS). Bantuan yang diberikan berupa sarana perbaikan rumah/penambah rumah untuk meningkatkan/memenuhi kebutuhan rumah layak huni

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat BSPS adalah bantuan pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya adalah program pemerintah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang disingkat MBR. Masyarakat Berpenghasilan Rendah adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. BSPS pada prinsipnya berupaya mendorong prakarsa dan upaya masyarakat agar memiliki kemampuan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi sendiri pembangunan rumahnya secara swadaya. Hal ini diperuntukan bagi rumah tidak layak huni menjadi rumah yang layak huni.

Program ini mendorong masyarakat menjadi pelaku utama dalam pembangunan rumah mereka dengan dukungan pendampingan teknis dan pengawasan agar rumah yang dibangun memenuhi standar kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

BSPS menargetkan keluarga yang memiliki rumah tidak layak huni (RTLH) dan keterbatasan finansial untuk perbaikan. Bantuan diberikan sebagai stimulan yang memacu masyarakat untuk mengerahkan swadaya dan partisipasi aktif, termasuk gotong royong, guna memperbaiki kondisi tempat tinggal mereka. Nilai bantuan disesuaikan dengan kebutuhan dan lokasi, misalnya sampai Rp17,5 juta per unit untuk daerah umum dan lebih tinggi untuk daerah khusus.

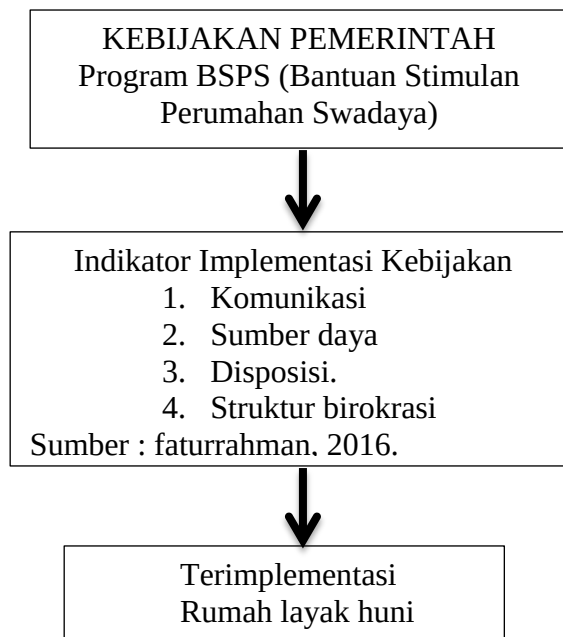
Pelaksanaan BSPS melalui tahapan sosialisasi, pendataan calon penerima, seleksi dan verifikasi, penyaluran bantuan bahan bangunan, pendampingan teknis dari fasilitator, serta monitoring dan evaluasi. Keberhasilan program sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat, koordinasi antar lembaga, serta kelengkapan sumber daya pendukung. Program ini tidak hanya meningkatkan kualitas fisik rumah tetapi juga memperkuat aspek sosial seperti solidaritas dan pemberdayaan komunitas.

Meski berdampak positif dalam meningkatkan taraf hidup dan kesehatan keluarga penerima, BSPS masih menghadapi tantangan seperti sosialisasi yang belum optimal, keterbatasan pendampingan teknis, dan kendala koordinasi pemerintah daerah sehingga perlu perbaikan agar manfaatnya lebih maksimal.

BSPS adalah program stimulan pemerintah yang memberdayakan warga berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah yang layak melalui bantuan bahan bangunan dan pendampingan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan di sektor perumahan masyarakat kurang mampu.

2.1 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1: Kerangka Pemikiran Penelitian Tentang Implementasi Kebijakan Program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dan Analisis Efektivitasnya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat



Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran

2.2 Hipotesis

Berdasarkan teori yang dikemukakan diatas, maka penulis menemukan suatu hipotesis diduga sebagai implementasi kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Tanjung Medan Kecamatan Cerenti belum berjalan secara optimal, karena masih terdapat kendala dalam proses sosialisasi, pendampingan teknis, dan koordinasi antar pihak pelaksana, sehingga belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima bantuan maupun masyarakat secara menyeluruh. Namun, apabila prosedur yang telah

ditetapkan sesuai dengan penerima maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.3 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penetapan makna suatu variabel dengan cara menjelaskan secara spesifik kegiatan, pelaksanaan, atau operasi yang diperlukan untuk mengukur, mengkategorisasi, atau memanipulasi variabel tersebut dalam penelitian. Definisi ini berfungsi sebagai panduan agar variabel dapat diukur secara jelas dan konsisten sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antara peneliti dan pembaca penelitian.

- 2.3.1 Komunikasi.** Suatu kebijakan akan terlaksana dengan baik jika terjadi komunikasi yang efektif antara pelaksana program dengan penerima sasaran dari program. Keputusan diperlukan agar para pembuat keputusan dan implementator semakin konsisten dalam melaksanakan kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.
- 2.3.2 Sumber Daya.** Dalam mewujudkan suatu kebijakan yang dapat mencapai targetnya harus didukung oleh sumber daya yang memadai.
- 2.3.3 Disposisi.** Adalah merujuk pada karakteristik dan komitmen yang dimiliki implementator. Pelaksana kebijakan harus mengetahui apa yang dikerjakan dan memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Sikap dari pelaksana kebijakan akan mempengaruhi dalam implementasi kebijakan. Para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa tugasnya saja tapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya.

Struktur Birokrasi. Menunjukkan bahwa struktur birokrasi menjadi hal yang penting dalam implelementasi. Struktur birokrasi berkaitan dengan adanya pembagian kerja serta adanya kejelasan di setiap fungsi dan kegiatan dari pembagian kerja tersebut yang terintegrasi dan terorganisir

2.4 Konsep Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator
Implementasi Kebijakan Program BSPS	Proses pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam bentuk pemberian bantuan stimulan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperbaiki atau membangun rumah layak huni di Desa Tanjung Medan.	1.Komunikasi: - a sosialisasi program, b. kejelasan informasi penerima manfaat, dan c. koordinasi. (Edward III). 2. Sumber Daya: a. kecukupan dana b. tenaga pendamping c. serta fasilitas teknis d. pendukung pelaksanaan program. 3. Disposisi (Sikap Pelaksana): - a.komitmen dan tanggung jawab aparat desa serta dinas perumahan dalam menjalankan tugasnya. 4.Struktur Birokrasi: - a.SOP kejelasan mekanisme kerja

Sumber : Modifikasi Penelitian, 2025

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menekankan pada pemahaman mendalam mengenai fenomena sosial serta interaksi manusia dalam konteks alamiah mereka

Menurut (Moleong, 2010) informasi dibuat dengan menggunakan metode penelitian kualitatif berupa data deskriptif. Data deskriptif adalah data yang berupa kata-kata, gambar dan bukan angka.

Dalam penelitian ini, fokus utama adalah untuk menggali proses pelaksanaan implementasi kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) serta mengevaluasi efektivitasnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tanjung Medan, Kecamatan Cerenti. Dengan pendekatan kualitatif, peneliti dapat memperoleh data yang bersifat deskriptif dan interpretatif melalui teknik pengumpulan data seperti wawancara mendalam dengan para penerima manfaat dan pelaksana program, observasi langsung di lapangan, serta studi dokumentasi terkait program BSPS.

Pendekatan kualitatif ini sangat relevan karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara komprehensif konteks sosial dan budaya masyarakat serta dinamika yang terjadi selama proses pelaksanaan program. Selain itu, metode ini memberikan ruang bagi partisipan untuk mengemukakan perspektif,

pengalaman, dan kendala yang mereka hadapi secara terbuka, sehingga hasil penelitian tidak hanya berupa data kuantitatif melainkan juga analisis mendalam yang mampu menggambarkan sebab-akibat dan faktor pendukung maupun penghambat keberhasilan program. Dengan demikian, penelitian kualitatif ini dapat memberikan gambaran yang lebih holistik terkait implementasi kebijakan BSPS dan kontribusinya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah di Desa Tanjung Medan.

3.2 Informan Penelitian

Informan adalah seseorang yang dapat memberikan petunjuk dan keterangan lebih lanjut yang di perlukan mencari informasi. Pada dasarnya wawancara dengan informan untuk mendapatkan keterangan dan data-data tertentu untuk keperluan informasi (koentjaraningrat, 1980: 163).

Sebagai informan atau narasumber adalah seseorang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi serta pengalaman pada masa lampau (Moleon, 2006: 132).

Menurut Rinaldi (2006: 3) informan merupakan orang-orang yang memiliki informasi tentang masyarakat yang ditelitinya yang juga disebut sebagai narasumber.

No	Narasumber	Jumlah
1.	Kepala Desa	1 orang
2.	Sekretaris Desa	1 orang
4.	Kepala Dusun	3 orang
5	Masyarakat Penerima Bantuan	7 orang
6	Masyarakat Umum	2 orang
Jumlah		14 Orang

Tabel 3.1 Informan

3.3 Sumber Data

3.3.1 Data Primer

Data primer adalah sumber data utama yang digunakan untuk menjangkau berbagai data dan informasi yang terkait dengan fokus yang dikaji. Hal ini dilakukan melalui metode wawancara, observasi dan dokumentasi secara mendalam dengan informan terhadap yang diteliti.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen dan literatur serta bahan-bahan tertulis baik dari dalam maupun dari luar wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yang mendukung dan berhubungan dengan produk bahasa penelitian ini.

3.4 Fokus Penelitian

Fokus penelitian diperlukan ,karena dapat membantu dalam pelaksanaan penelitian,dan membantu untuk mencapai tujuan. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini tentang implementasi kebijakan program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS).

3.5 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah dikabupaten kuantan singingi dengan studi kasus kecamatan cerenti desa tanjung medan yaitu didesa dan perumahan warga yang menerima bantuan.

3.6 Metode Pengumpulan Data

3.6.1 Wawancara

Menurut Esterberg (2002) mendefinisikan wawancara sebagai pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga hasil dari wawancara dapat diolah dan dikonstruksikan dalam suatu topik tertentu.¹³ Wawancara dapat dilakukan dalam tahap awal penelitian dan dilanjutkan dengan wawancara penelitian yang lebih mendalam.

Incoln dan Guba berpendapat mengenai wawancara yaitu : mekonstruksi mengenai orang, berbagai kejadian/kegiatan, motivasi, perasaan dan sebagainya, merekonstruksi yaitu menceritakan/menyusun kembali berbagai kejadian atau fenomena, memverifikasi yaitu mengubah dan memperluas informasi atau kontruksi yang dibuat oleh peneliti.

3.6.2 Dokumentasi

Dokumentasi adalah bentuk kegiatan atau proses sistematis dalam melakukan pencarian, pemakaian, penyelidikan, penghimpunan, dan penyediaan dokumen untuk memperoleh penerangan pengetahuan, keterangan, serta bukti dan juga menyebarkannya kepada pihak berkepentingan.

3.6.3 Observasi

Observasi merupakan salah satu dasar fundamental dari semua metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, khususnya menyangkut ilmu-ilmu sosial dan perilaku manusia (Hasanah, 2017).

3.7 Teknik Analisis Data

3.7.1 Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan atau seleksi, pemusatan perhatian atau pemfokusan serta penyerdahaan dari semua jenis informasi yang mendukung data penelitian yang diperoleh dan dicatat selama proses penelitian data di lapangan (Wahyuni & Ulum, 2025).

3.7.2 Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses penyusunan informasi yang memberi kemungkinan adanya kesimpulan dalam penelitian kualitatif, penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan sejenisnya (Wahyuni & Ulum, 2025).

3.7.3 Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan proses terakhir dari langkah-langkah yang dilakukan diatas. Penarikan kesimpulan diambil dari data yang telah dianalisis dan data yang sudah dicek berdasarkan bukti yang didapatkan dilokasi penelitian(Wahyuni & Ulum, 2025).

3.8 Jadwal Penelitian

Tabel 3.2 : Jadwal Penelitian Tentang Implementasi Kebijakan Program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dan Analisis Efektivitasnya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

No	Kegiatan	Bulan dan Minggu dalam Tahun 2025-2026																							
		September				Oktober				November				Desember				Januari				Februari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul Proposal	X																							
2	Pembuatan Proposal		X		X																				
3	Bimbingan Proposal					X																			
4	Seminar Proposal										X	X	X												
5	Revisi Proposal														X										
6	Pembuatan Skripsi															X									
7	Bimbingan Skripsi																X	X							
8	Sidang Skripsi																	X	X						
9	Revisi Skripsi																				X				

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Kantor Desa Tanjung Medan Kecamatan Cerenti

Desa Tanjung Medan adalah desa yang mekar pada tanggal 15 february 2005 dari desa Sikakak yang pada saat ini dihuni oleh 213 kepala keluarga dan 867, jiwa. Yang pada umumnya berasal dari desa induk yaitu desa Sikakak, hanya sebagian kecil saja yang datang dari desa tetangga, seperti pulau panjang inuman, Kompe Berangin dan lainnya. Dengan berbagai macam mata pencaharian seperti petani karet petai padi, pencari ikan, berniaga dan lain sebagainya. Pada tahun 2026 jumlah penduduk desa Tanjung Medan mencapai sejumlah 867 KK dan sebanyak 867 jiwa, membuka dan menggarap tanah yang telah disediakan oleh pemerintah atau garapan sendiri seluas 395 Hektar. Sebelum desa Tanjung Medan definitif desa Tanjung Medan dipimpin oleh Kepala Desa persiapan yang bernama Martius atas dasar musyawarah tokoh masyarakat desa, beliau menjabat lebih kurang 2 tahun, kemudian diintruksikanlah oleh Camat Cerenti, yang menjabat sebagai Camat Cerenti yaitu Bapak Efrizon Merzuki, M.Sc, untuk melaksanakan pemilihan kepala desa maka dibentuklah panitia pemilihan kepala desa dan pada saat itu ada 4 kandidat calon kepala desa yang ikut kompetisi, yaitu Martius, Jalinus Puce, Rajiman, Kurniawan Repolita, maka terpilihlah Martius sebagai Kepala Desa selama 4 tahun yang kemudian pada tahun 2010 turun surat Bupati Kuantan Singingi bahwa Desa yang baru dimekarkan diadakan pemilihan kepala desa kembali, dan diulangnya pemilihan kepala desa dengan 2 kandidat calon kepala desa yaitu Martius dan M. Ali dan terpilihlah Martius menjabat

kepala desa sampai tahun 2016, kemudiandijabat oleh Pj kepala desa Alek salman, S.Sos pada tahun 2017. Tahun 2005 sampai 2016 martius sebagai kepala desa terpilih dan jalinus sebagai sekdes. Tahun 2014 sampai 2016 M.Zen pengganti jalinus Puce sebagai sekdes. Tahun 2016 sampai 2017 Alek salman S.Sos sebagai Pj.kepala desa dan M.Zen sebagai sekdes Tahun 2018 sampai sekarang kepala desa dijabat oleh M. Neru dan M.zen Sebagai sekdes.

4.2 Letak Geografis Desa Tanjung Medan

4.2.1 Keadaan Geografis

Desa Tanjung Medan merupakan salah satu desa diantara 12 desa dikecamatan cerenti Kabupaten Kuantan Singingi dengan luas wilayah 395 Ha yang terbagi atas 3 dusun yaitu dusun pulau kanji, dusun sungai tobek, dusun danau raja. Secara administrasi desa Tanjung Medan berbatasan dengan 4 desa.

Ditinjau dari letak geografisnya desa Tanjung Medan mempunyai batas wilayah

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kompe Berangin
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sikakak.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pulau Panjang Hilir
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kampung Baru

Sedangkan jarak ke ibukota kabupaten dan jarak ibukota kecamatan

sebagai berikut:

1. Jarak desa ke ibukota kabupaten adalah 60 km, dan lama perjalanan selama 2 jam

2. Jarak ke ibukota kecamatan adalah 5 km dengan lama perjalanan selama 15 menit Desa Tanjung Medan beriklim tropis, musim yang terdapat di Desa Tanjung Medan sama halnya dengan daerah lain yaitu dua musim, yaitu musim panas dan musim hujan. Kondisi inilah yang membuat daerah tersebut berpotensi sebagai daerah pertanian dan perkebunan.

4.3 Penduduk

Berdasarkan data statistik pada Kantor Desa Tanjung Medan Tahun 2026, jumlah penduduk Desa Tanjung Medan berjumlah 867 jiwa atau dengan jumlah Kepala Keluarga 213 KK,.

Daftar Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk/April tahun 2026	Laki laki (orang)	Perempuan (orang)	Total
	683	606	1.289

Sumber data : Kantor Desa Tanjung Medan

Pada tabel IV.1 di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk Desa Tanjung Medan pada tahun 2026 laki-laki sebanyak 683 orang, dan Perempuan sebanyak 606 orang.

4.4 Pemerintahan Desa

Desa Tanjung Medan merupakan desa yang berpedoman dan berlandaskan pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dalam pelaksanaan tugasnya dibentuk oleh perangkat desa. Selanjutnya dibentuk pula

dusun-dusun yang selanjutnya dipimpin oleh kepala dusun, RW (Rukun Warga), dan dibawah RW ada RT (Rukun Tetangga), berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Adapun jumlah aparat pemerintahan Desa Tanjung Medan dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut:

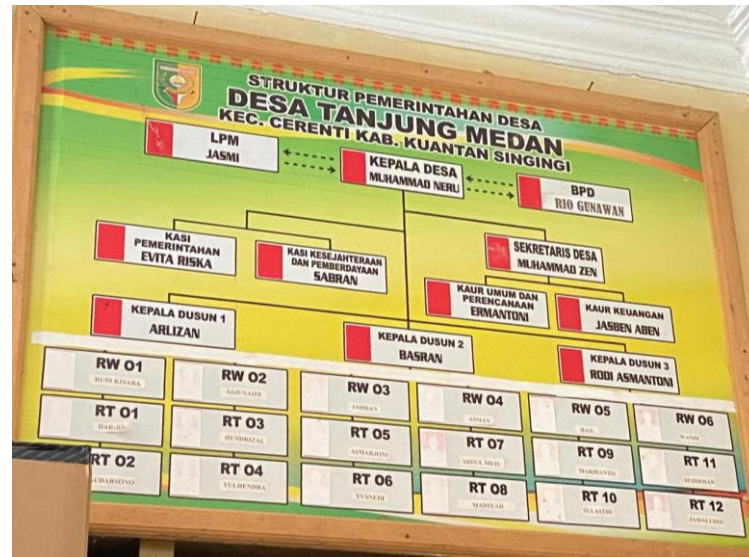
Tabel 4.2 Aparat Pemerintah Desa

No.	Jumlah Aparat Pemerintah Desa	Jumlah
1.	Kepala Desa	1
2.	Sekretaris Desa	1
3.	Kepala Dusun	3
4.	Perangkat Desa	6
5.	BPD	5

Sumber Data : Kantor Desa Tanjung Medan

Untuk menegaskan tata pembagian dan hubungan kerja unit-unit organisasi pemerintahan desa, maka dijelaskan kedudukan, tugas dan fungsi unit unit kerja dalam struktur pemerintahan desa sebagai berikut:

Gambar 4.1 Struktur Pemerintahan Desa Tanjung Medan Kec. Cerenti Kab. Kuantan Singingi



Sumber : Kantor Desa Tanjung Medan 2026

Dari bagan diatas diketahui bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan koordinasi dengan Kepala Desa untuk melakukan Tugas dan Fungsinya, adapun Kepala Desa merupakan pemerintahan tertinggi di tingkat desa, yang dibantu oleh seorang Sekretaris Desa, kemudian di bawah Kepala Desa terdapat 4 Kaur yang akan membantu Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan desa. Adapun keempat Kaur tersebut adalah Kaur Pembangunan, Kaur Pemerintahan, Kaur Keuangan dan Kaur Umum. Dan dibawah Kaur ada Dusun. Untuk di Desa Tanjung Medan terdapat 3 Dusun, yaitu:

1. Dusun Pulau Kanji
2. Dusun Sungai Tobek

3. Dusun Danau Raja

Tabel 4.3 Mata Pencaharian Penduduk Desa Tanjung Medan

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	700 orang
2.	Pedagang	25 orang
3.	PNS	7 orang
4.	Tukang	5 orang
5.	Guru	9 orang
6.	Bidan/Perawat	2 orang
7.	Swasta	10 orang

Sumber : Kantor Desa Tanjung Medan

4.5 Budaya

Masyarakat Desa Tanjung Medan pada dasarnya adalah suku Melayu. Sebagai masyarakat yang patuh pada tatanan pemerintahan, masyarakat Desa Tanjung Medan masih kental berpegang teguh pada adat istiadat yang berlaku. Berikut ini beberapa tradisi atau budaya yang masih terus dilaksanakan oleh masyarakat Desa Tanjung Medan, diantaranya:

1. Mandi Balimau

Mandi balimau merupakan tradisi masyarakat yang sampai saat ini masih dipertahankan oleh masyarakat Desa Tanjung Medan. Tradisi ini dilaksanakan ketika akan menyambut bulan suci Ramadhan, dimana masyarakat berkumpul di tepi sungai kuantan dengan tujuan membersihkan diri.

2. Musik Tradisional

Adapun musik tradisional masyarakat Desa Tanjung Medan adalah calempung. Biasanya musik tradisional calempung ini akan dimainkan pada acara-acara seperti: perkawinan, sunatan atau khitan, dan acara-acara adat lainnya.

3. Wirid Yasin

Masyarakat Desa Tanjung Medan telah lama membudayakan kegiatan-kegiatan yang bersifat mempererat tali persaudaraan seperti perkumpulan wirid yasin. Perkumpulan ini bertujuan untuk mendoakan masyarakat yang ditimpa musibah seperti meninggal dunia, dengan cara membacakan surah Yaasin secara bersamasama.

4.6 Kesehatan

Dalam melayani masyarakat dibidang kesehatan, pemerintah Desa Tanjung Medan telah mendirikan satu buah Puskesmas yang buka setiap hari senin sampai dengan hari sabtu bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Bila dilihat dari intensitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Desa Tanjung Medan yang membuka jam praktek dari hari senin sampai dengan hari sabtu, masih dirasakan kurang oleh masyarakat setempat, hal ini disebabkan karena masih kurangnya alat medis yang tersedia. Akan tetapi karena di kecamatan juga tersedia Puskesmas yang lebih besar dan lengkap, masyarakat juga lebih banyak yang berobat ke Puskesmas Kecamatan tersebut serta disebabkan jaraknya yang juga tidak terlalu jauh dari desa.

4.7 Visi-Misi Desa Tanjung Medan Cerenti

4.7.1 Visi

“Terwujudnya desa tanjung medan yang maju, mandiri, sejahtera, dan berbudaya melalui tata kelola pemerintahan desa yang baik serta pembangunan masyarakat yang berkelanjutan”

4.7.2 Misi

- a.** Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan desa yang aktif, transparan, dan akuntabel
- b.** Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
- c.** Mengembangkan potensi ekonomi masyarakat melalui sektor pertanian, perkebunan, dan usaha masyarakat desa
- d.** Meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan keinginan sosial kemasyarakatan
- e.** Mewujudkan kehidupan masyarakat yang religius, aman, tertib, dan harmonis.
- f.** Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa.
- g.** Melestarikan adat istiadat dan budaya lokal sebagai identitas masyarakat tanjung medan

BAB IV

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Peniliti Dapat Menarik Kesimpulan Bahwa Hasil Penelitian Yang Dilakukan Terkait Implementasi Kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Desa Tanjung Medan Kecamatan Cerenti sudah terimplementasi. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan informan dilapangan.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, berikut beberapa saran yang diajukan peneliti untuk meningkatkan pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya.

1. Pemerintah desa perlu meningkatkan intensitas sosialisasi kepada masyarakat agar informasi mengenai persyaratan, mekanisme, dan tahapan BSPS dapat dipahami secara menyeluruh oleh calon penerima bantuan.
2. Pemerintah dan instansi terkait perlu meningkatkan koordinasi serta pendampingan kepada masyarakat selama proses pelaksanaan program sehingga berbagai kendala yang muncul dapat segera ditangani.
3. Aparatur desa perlu terus mempertahankan sikap responsif dan pelayanan yang baik kepada masyarakat agar kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah semakin meningkat.

4. Pelaksanaan SOP dan mekanisme kerja yang telah ada perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan guna menjamin pelaksanaan BSPS berjalan secara transparan, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengkaji Program BSPS dari aspek lain, seperti tingkat kepuasan masyarakat, efektivitas program, atau dampak program terhadap kesejahteraan masyarakat penerima bantuan sehingga dapat memperkaya kajian mengenai program BSPS.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Aneta, A. (2012). Perkembangan Teori Administrasi Negara. *Jurnal Inovasi*, 9(1), 1–24.
<https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jin/article/view/703%0Ahttps://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jin/article/download/703/647>
- Badrudin. 2012. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kuantan Singingi. 2023. *Laporan Monitoring dan Evaluasi Program BSPS di Kecamatan Cerenti*. Kuantan Singingi: Dinas Perumahan.
- Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian PUPR. 2020. *Pedoman Teknis Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)*. Jakarta: Kementerian PUPR.
- Sutrisno, B. 2021. "Evaluasi Implementasi Program BSPS dalam Pengentasan Rumah Tidak Layak Huni di Indonesia." *Jurnal Administrasi Publik* 5(2):123–137.
- Faturrahman. 2016. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Handoyo, Eko. 2012. *Kebijakan Publik*. Semarang. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang "Widya Karya" Anggota IKP.
- Hasan, H., Informasi, S., Vidio, D., & Pendahuluan, I. (2022). *Pengembangan sistem informasi dokumentasi terpusat pada stmik tidore mandiri*. 2(1), 23–29.
- Hasanah, H. (2017). TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial). *At-Taqaddum*, 8(1), 21.
<https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>
- Hasman. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Hava Media.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Jurnal UNSRAT. (2021). Implementasi program BSPS di Desa Tolok Satu Kecamatan Tomaso.
- Kadji, Y. 2016. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo Press Anggota IKP.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. 2018. *Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya*. Jakarta: Kementerian PUPR.

- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. 2019. *Keputusan Menteri PUPR Nomor 158/KPTS/M/2019 tentang Besaran Nilai dan Alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya*. Jakarta: Kementerian PUPR.
- Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia. (2013). *Peraturan Menteri Perumahan Rakyat RI No. 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya*.
- Meutia, Intan Fitri. 2017. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandar Lampung. AURA (CV. Anugrah Utama Raharja) Anggota IKP.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Mustari, Nuryanti. 2015. *Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta. PT. Leutika Nouvalitera.
- NEGARA, B. H. A. (2012). *Ilmu administrasi negara*.
- Nugraha, Budi, dkk. 2022. *Teori Administrasi*. Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Pratama, I., dan Santoso, R. 2022. "Partisipasi Masyarakat dalam Program BSPS dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraan Sosial Ekonomi." *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan* 10(1):45–62.
- Rivai, N. I., Akhyari, E., Basalamah, R. H., & Septiawan, A. (2024). *buku teori organisasi*.
- Septiani, S., Senoaji, F., Maghfirah, N., Martha, D., Agustina, A., Solihat, I., Chandra, F., Musdalifah, S, R. A. R., Gusnafitri, Awa, Baqi, M. P. A., Meliana, Sugina, Lailla, N., Nurrokhim, I., Soleh, O., & Solihin, I. (2024). *buku manajemen kompensasi*.
- Sinurat, A. A. T. (2022). Implementasi program BSPS di Desa Pakkat. *Repository Universitas Medan Area*.
- Sutrisno, B. 2021. Evaluasi Implementasi Program BSPS Dalam Pengentasan Rumah Tidak Layak Huni di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(2) 123-137
- Wahyuni, N. S., & Ulum, M. (2025). Implementasi Metode Outdoor Learning dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(6), 6117–6124. <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i6.8295>

Werdiningsih, R., Munawar, Z., Ernayani, R., Cahyadi, N., Nurkadarwati, Afnanda, M., Khasanah, Achmad, H. M., Muthalib, D. A., & Rini, A. S. (2023). *buku konsep dasar teori organisasi*.

Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo

DOKUMENTASI



(Wawancara bersama Masyarakat Umum)



(Wawancara bersama Masyarakat yang Menerima Bantuan)



(Wawancara bersama Masyarakat yang Menerima Bantuan)



(Wawancara bersama Masyarakat yang Menerima Bantuan)





(Wawancara bersama Masyarakat yang Menerima Bantuan)



(Wawancara bersama Kepala Dusun)



(Wawancara bersama Kepala Desa)



(Wawancara bersama Sekretaris Desa)



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Form 11

Jl.GatotSubroto KM 7 TelukKuantanTelp.0760-561655 Fax.0760-561655,e-mail unikskuantan@gmail.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK REVISI SKRIPSI

Skripsi Mahasiswa dengan :

Nama : **Meilin Alyudia**

NPM : 220411045

Program Studi : Administrasi Negara

Judul : Implementasi Kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Tanjung Medan Kecamatan Cerenti.

Hari/Tgl Ujian : Jum'at / 10 Juli 2026

Dinyatakan sudah melakukan revisi atas skripsinya.

NO	NAMA DEWAN SIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Sarjan M, S.Sos.,M.Si	Ketua Dewan Sidang	1.
2.	Emilia Emharis, S.Sos.,M.Si	Sekretaris / Pembimbing 2	2.
3.	Dr. Desriadi, S.Sos.,M.Si	Pembimbing 1	3.
4.	Alsar Andri, S.Sos.,M.Si	Anggota 1	4.
5.	Risvandi, S.Pd.I.,M.Si	Anggota 2	5.

Catatan:

Setelah ditandatangani, formulir ini diphotocopy oleh mahasiswa sebanyak pembimbing dan penguji yang hadir saat sidang skripsi dan diberikan kepada pembimbing 1 (satu) bersama dengan persyaratan lainnya.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Meilin Alyudia

Tempat/Tanggal lahir : Cerenti, 19 Mei 2004

Jenis Kelamin : Perempuan

Status : Belum Kawin

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Desa Tanjung Medan, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi

Pendidikan : 1. TK Harapan Bunda Kompe Berangin
2. SDN 008 Kompe Berangin
3. SMP Negeri 3 Cerenti
4. SMAN 1 Cerenti



Demikian riwayat ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Teluk Kuantan, 07 Maret 2026

Penulis

Meilin Alyudia



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jln Gatot Subroto KM. 07Kebun Nenas jake Telp.0760-561655,e-mail unikskuantan@gmail.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK REVISI PROPOSAL

Proposal Skripsi Mahasiswa dengan :

Nama : Meilin Alyudia

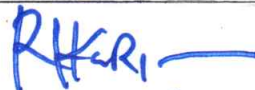
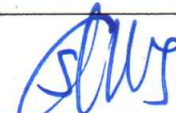
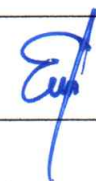
NPM : 220411045

Program Studi : Administrasi Negara

Judul : Implementasi Kebijakan Program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dan Analisis Efektivitasnya dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Hari/Tgl Ujian : Senin / 01 Desember 2025

Dinyatakan sudah melakukan revisi atas proposal skripsinya.

NO	NAMA DEWAN SIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si	Ketua Dewan Sidang	1. 
2.	Sarjan M, S.Sos.,M.Si	Sekretaris Dewan Sidang	2. 
3.	Desriadi, S.Sos., M.Si	Pembimbing 1/ Anggota 1	3. 
4.	Emilia Emharis, S.Sos., M.Si	Pembimbing 2/ Anggota 2	4. 

Catatan:

Setelah ditandatangani, formulir ini diphotocopy oleh mahasiswa sebanyak pembimbing dan penguji yang hadir saat sidang skripsi dan diberikan kepada pembimbing 1 (satu) bersama dengan persyaratan lainnya.



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jl. Gatot Subroto KM 7 Teluk Kuantan Telp. 0760-561655 Fax. 0760-561655, e-mail uniksquantan@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
NOMOR : 017/Kpts/FIS/UNIKS/VIII/2025
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM SARJANA (S1) ADMINISTRASI NEGARA

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

- Menimbang :**
1. Bahwa penulisan skripsi merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Sarjana (S1) Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi.
 2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian skripsi, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
 3. Bahwa nama-nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2013 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi.
 4. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 5. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi Nomor : 012/UNIKS/Kpts/III/2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Dilingkungan Universitas Islam Kuantan Singingi.
- Memperhatikan :** Berdasarkan hasil rapat Senat Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi tentang Penunjukan Dosen Pembimbing Tugas Akhir (TA) Tahun Akademik 2024/2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
1. Menunjuk :
 - a. Pembimbing I : Desriadi, S.Sos., M.Si
NIDN : 1022018302
 - b. Pembimbing II : Emilia Emharis, S.Sos., M.Si
NIDN : 1002059002

Untuk Penulisan Skripsi Mahasiswa :

Nama : Meilin Alyudia
NPM : 220411045

Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Analisis Efektifitasnya dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Tanjung Medan Kecamatan Cerenti.

2. Tugas-tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Sarjana (S1) Administrasi Negara dalam penulisan skripsi.
3. Dalam Pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan skripsi sesuai dengan Buku Panduan Program Sarjana (S1) Administrasi Negara.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Kuantan Singingi.
5. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui.

DITETAPKAN DI : TELUK KUANTAN
PADA TANGGAL : 11 Agustus 2025
Dekan,


RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si
NIDN. 1030058402

DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN TENTANG

**Judul : Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di
Desa Tanjung Medan Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi**

A. Identitas Peneliti

Nama : Meilin Alyudia
NPM : 220411045
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial
Universitas : Islam Kuantan Singingi
Jenjang Pendidikan : S-1 (Strata Satu)
Nomor telepon : 087832254243
Email : meilin182020@gmail.com

B. Identitas Responden

No :
Nama :
Jenis Kelamin :
Tingkat Pendidikan :
Usia :
Pekerjaan :
Alamat :

C. Petunjuk Wawancara

1. Daftar pertanyaan wawancara ini hanya dimaksud untuk penulisan skripsi dan tidak merugikan siapapun.
2. Jawablah sesuai dengan yang Bapak/Ibu/Saudara/i ketahui, dan isilah titik-titik pada ruang yang telah disediakan.
3. Identitas Bapak/Ibu/Sadaura/i dijamin kerahasiannya.
4. Atas kerja sama Bapak/Ibu/Sadaura/i saya ucapkan terima kasih.

D. Pertanyaan wawancara untuk kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat penerima bantuan di desa tanjung medan kecamatan cerenti kabupaten kuantan singingi

I. KOMUNIKASI

1. Bagaimana proses sosialisasi program BSPS kepada masyarakat di Desa Tanjung Medan?

Jawaban:.....

2. Bagaimana kejelasan informasi mengenai persyaratan dan mekanisme penerimaan BPS di desa ini?

Jawaban:.....

3. Bagaimana koordinasi antara pemerintah desa, fasilitator, dan dinas terkait dalam pelaksanaan BPS?

Jawaban :.....

II. SUMBER DAYA

1. Bagaimana ketersediaan sumber daya dalam pelaksanaan BPS di desa tanjung medan?

Jawaban:.....

2. Bagaimana kecukupan dana bantuan dalam memenuhi kebutuhan perbaikan rumah tidak layak huni?

Jawaban:.....

3. Bagaimana ketersediaan bahan bangunan dan sarana pendukung lainnya?

Jawaban:.....

III. DISPOSISI

1. Bagaimana komitmen pelaksana program dalam menjalankan BPS sesuai aturan?

Jawaban:.....

2. Bagaimana respon pelaksana terhadap kendala yang dihadapi penerima bantuan di desa tanjung medan?

Jawabaan:.....

3. Bagaimana sikap aparat desa dalam membantu masyarakat penerima bantuan?

Jawabaan:.....

IV. STRUKTUR BIROKRASI

1. Bagaimana kejelasan SOP dalam pelaksanaan BPS di Desa Tanjung Medan?

Jawaban:.....

Cerenti, April 2026

Informan



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Telepon (0760) 2524242 Fax (0760) 2524242 Kode Pos 29562
Email : dpmtsp@kuansing.go.id, Website : <https://dpmtsp.kuansing.go.id>
TELUK KUANTAN

REKOMENDASI

Nomor : 75/DPMPTSP-PTSP/1.04.02.02/2026

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuantan Singingi, setelah membaca Surat Rekomendasi dari UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI Nomor:038/FIS/UNIKS/III/2026 Tanggal 09 MARET 2026.

Dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **MEILIN ALYUDIA**
NIM : **220411045**
Jurusan : **ADMINISTRASI NEGARA**
FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
Jenjang Pendidikan : **S1**
Alamat : **TELUK KUANTAN**
Judul Penelitian : **"IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN SIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DI DESA TANJUNG MEDAN KECAMATAN CERENTI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI"**
Untuk melakukan Penelitian di : **KANTOR DESA TANJUNG MEDAN**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.
3. Hasil riset / pra riset dan pengumpulan data dilaporkan kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan riset / pra riset ini, dan terima kasih.

Dikeluarkan di : Teluk Kuantan
Pada Tanggal : 11 Maret 2026

Ditandatangani Secara Elektronik oleh :



Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kuantan Singingi,

ERDIANSYAH, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19720821 199201 1 002

Tembusan : disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan;
2. Instansi terkait;
3. Arsip.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
KECAMATAN CERENTI
KANTOR DESA TANJUNG MEDAN

Alamat ; Jalan Danau Sikuran, No..... Kode Pos 29565

SURAT KETERANGAN

Nomor : /Pem/ Ds-Tjm/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Tanjung Medan Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama	: MEILIN ALYUDIA
NIM	: 220411045
Progam Studi	: Administrasi Negara
Universitas	: Universitas Islam Kuantan Singingi

Yang tersebut di atas telah melakukan wawancara dan pengambilan data yang digunakan untuk keperluan penelitian guna penulisan Tugas Akhir pada tanggal 07 s/d 10 April dengan judul “ **Implementasi Kebijakan Program BPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) di Desa Tanjung Medan Kecamatan Cerenti** “.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan Di : Tanjung Medan

Pada Tanggal : 12 Juni 2026

Kepala Desa Tanjung Medan,



MUHAMMAD NERU



PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI

UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jl. Gatot Subroto KM.7 Teluk Kuantan Telp. 0760-561655 Fax.

0760-561655, e-mail. Unikskuantan@gmail.com

CATATAN BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

NAMA : MEILIN ALYUDIA

NPM : 220411045

DOSEN PEMBIMBING : Pembimbing 1. DESRIADI, S.SoS.,M.Si

2. EMILIA EMHARIS, S.Sos.,M.Si

JUDUL : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN
STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA DAN ANALISIS
EFEKTIVITASNYA DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA TANJUNG
MEDAN KECAMATAN CERENTI

Mulai Bimbingan

NO	Hari/Tanggal	Catatan	Paraf		Paraf Mahasiswa
			P1	P2	
1.	SELASA 21 OKTOBER 2021	<i>paraf di tulis</i>		<i>EP</i>	
2.	SENIN 03 NOVEMBER 2021	<i>Tulis di tulis</i>		<i>EP</i>	
3.	RABU 05 NOVEMBER 2021	<i>paraf di tulis</i>		<i>EP</i>	

		Hyphen funder.		Σ	
		Acc		Σ	
	12/11.2025	Posi kebaya paku			
		Uchic baktar			
		Uchic baktar			
	13-2026	see after water			
	17/06.2026	ACC			
	18/06.2026	ACC			